

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM -DESA)**

TAHUN 2019 - 2025



**DESA PLALANGAN
KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan menggunakan pola perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk Periode 6 (enam) tahun yang disusun secara partisipatif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan rencana strategis desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, program dan kegiatan pembangunan desa. Dokumen RPJMDes ini juga diharapkan sebagai pedoman di dalam melakukan pengawasan / pengendalian pembangunan di Desa, sehingga setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada Pemerintahan Desa maupun Masyarakat.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di Desa. Agar pembangunan di Desa dapat berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten senantiasa diharapkan untuk perbaikan.

Plalangan, 2019
Kepala Desa Plalangan

(SOFYAN ZULKARNAIN MALIK)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Tujuan

BAB II PROFIL DESA

1. Sejarah Desa
2. Kondisi Umum Desa
3. Kelembagaan Desa
4. Masalah dan Potensi Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

1. Pengkajian Keadaan Desa
2. Musyawarah Desa RPJM Desa

BAB IV : VISI DAN MISI

1. Visi Desa
2. Misi Desa
3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

BAB V : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM KEGIATAN

1. Arah Kebijakan Keuangan Desa
2. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perdes RPJMDes
2. Berita Acara kesepakatan Kepala Desa dan BPD tentang Penetapan Perdes RPJMDes
3. Daftar gagasan/usulan dusun
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
5. Matrik Kegiatan RPJMDes 6 Tahun
6. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Per Tahun
7. Berita Acara hasil pengkajian keadaan desa
8. Berita Acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes
9. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJMDes
10. Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJMDes

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

2. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
5. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5694;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 297);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor Tahun tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Jember Tahun 2019 – 2021;
11. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2014 tentang Identifikasi dan Inventarisasi, Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Kalisat Nomor Tahun tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

3. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Plalangan ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Plalangan
 - c. Sebagai masukan penyusunan RKPDes dan RAPB Desa Plalangan
2. Manfaat RPJM Desa :
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

PROFIL DESA

1. SEJARAH DESA

Sebelum masa Pemerintahan Desa, Desa Plalangan adalah satu warisan dari nenek moyang terdahulu yang bernama BUJUK SOEPI, beliau adalah sesepuh desa dan panutan dari penduduk desa masa itu, dimana masa tersebut adalah masa akhir-akhir runtuhnya kerajaan Majapahit. beliau wafat di desa Plalangan dan makamnya berada di pemakaman umum yang terletak di dusun Prengtaleh Desa Plalangan. Menurut cerita dari penduduk Desa Plalangan terdahulu desa ini tidak memiliki nama sehingga penduduk setempat memberi nama PRENG TALEH yang diambil dari Nama Pembabat tanah leluhur Desa Plalangan KI DJOJO ROKSO dengan nama Desa PLALANGAN.

Pekerjaan penduduk sehari-hari adalah bertani di sawah dan menangkap ikan karena luas desa Prengtaleh didominasi oleh persawahan, dan setiap satu minggu sekali penduduk juga bekerja bakti membuat akses jalan dengan membabat hutan karena pada masa itu jalan desa masih berupa jalan setapak. hingga pada suatu hari ketika masyarakat desa sedang bergotong royong membuat akses jalan, lewatlah seorang wanita yg didampingi seorang pengawal dengan mengendarai kereta kuda, wanita tersebut di tengarai adalah saudara dari Dewi Rengganis dan hendak menjenguk Dewi Rengganis yang berada di Argopuro (Desa Sumberanget saat ini) di Candi Kedaton/Lawang Kedaton (candi lawang kedaton adalah peninggalan kerajaan Majapahit yg katanya candi tersebut merupakan akses rahasia menuju Candi Jabung paiton dan tempat Dewi Rengganis di Gunung Argo puro) Sumber: Cerita Rakyat.

Namun Karena akses jalan menuju lawang kedaton masih belum ada akses jalan, penduduk menghentikan Wanita tersebut dan meminta agar kembali karena akses masih belum ada dan hutan masih lebat, khawatir takut nanti wanita tersebut diserang hewan buas. (Jalan menuju Lawang kedaton adalah melalui jalur timur yaitu dari desa tanah merah, gunung gambir kabupaten Jember.) Sumber Cerita Rakyat.

Namun wanita tersebut tetap melanjutkan perjalanannya, tidak sempat untuk bertanya siapa nama wanita tersebut dan kemana tujuannya, pengawalnya sudah menghentak kuda dan pergi. (namun jika melihat dari pakaian wanita dan pengawalnya wanita tersebut berasal dari Kerajaan Majapahit) sumber: cerita Rakyat.

Mungkin karena penasaran atau khawatir terjadi apa-apa terhadap wanita dan pengawalnya tersebut karena tidak kembali, lewat tengah hari beberapa penduduk dan sesepuh penerus /murid dari Ki Demang Haris menyusul wanita tersebut.

Namun hingga sampai puncak jalan buntu, wanita dan pengawalnya serta kereta kudanya tidak ada. Sebagian cerita menyebutkan kereta beserta wanita tersebut menghilang/terbang karena di sana tidak ada bekas apapun dari kereta tersebut.

(tempat menghilangnya kereta tersebut sekarang diberi nama PAL(tapal batas Desa Kademangan karena penduduk setempat tidak lagi meneruskan pekerjaannya untu membuka area perdesaan.

Singkat cerita sejak saat itu penduduk mengganti nama desa kademangan dengan desa PLALANGAN andung yang berarti ANDONG atau kereta kuda, sedangkan sari hingga saat ini tidak diketahui artinya, apakah diambil dari nama wanita itu atau diambil dari nama bunga yang dibawanya(karena wanita tersebut juga membawa bunga sejenis mawar namun sangat harum) hingga saat ini masih menjadi pertanyaan.

(Sumber:Cerita Sesepuh Desa Plalangan

2. KONDISI UMUM DESA

Desa Plalangan terletak di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan memiliki luas Administrasi 805.712 Ha, terdiri dari 4 dusun yaitu :

- 1. Dusun Plalangan
- 2. Dusun Krajan
- 3. Dusun Curahlembu
- 4. Dusun Jambuan

Sedangkan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Ajung kecamatan Kalisat
- b. Sebelah Timur : Desa Sumberanget kecamatan Ledokombo
- c. Sebelah Selatan :Desa Gambiran Lembengan kecamatan Ledokombo
- d. Sebelah Barat : Desa Gambiran/Glagahwero kecamatan Kalisat

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	102.000
2	Luas Persawahan	391.000.
3	Luas ladang	399.000
4	Luas Perkebunan	12.000
5	Hutan Negara	-
6	Padang gembala	-
7	Danau	-
8	Luas Kuburan	30
9	Luas Pekarangan	-
10	Luas Taman	-
11	Luas Perkantoran	-
12	Luas Prasarana Umum lainnya	300.682
	Luas Wilayah	805.712

Sedangkan Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Tanah Kas Desa :	6
	a. Tanah Bengkok	-
	b. Tanah Titi Sara	-
	c. Kebun Desa	-
	d. Sawah Desa	-
2	Lapangan Olahraga	2
3	Perkantoran pemerintah	-
4	Ruang publik/taman kota	-
5	Tempat pemakaman desa/umum	4
6	Tempat pembuangan sampah	-
7	Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	5
8	Pertokoan	-
9	Fasilitas pasar	-
10	Terminal	-
11	Tanah utk Jalan	11
12	Daerah tangkapan air	-
13	Usaha perikanan	6
14	Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	-
	Total Luas	805.712

Jumlah penduduk pada tahun 2019 tercatat sebanyak 10.204 jiwa, terdiri atas laki-laki 4.997 jiwa dan perempuan 5,207 jiwa.

Jumlah Penduduk Di Tiap Dusun Tahun 2019

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Jumlah KK Miskin
		L	P	Total		
1	Plalangan					
2	Krajan					
3	Curahkembu					
4	Jambuan					
5						
6						
7						
8						
Jumlah						

Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	Tahun				Rata Rata % Pertumbuhan
				2019	
Laki laki					
Perempuan					
Jumlah					

Sebagian besar penduduk Desa bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor lain yang Secara detail mata pencahariaan penduduk adalah sebagai berikut :

Mata Pencaharian Penduduk

(orang)

No	Mata Pencairan	Th.		Th. 2019	
1	Petani				
2	Buruh tani				
3	Buruh migran perempuan			11	
4	Buruh migran laki-laki			3	
5	Pegawai negeri sipil			23	
6	Pengrajin industri rumah tangga			59	
7	Pedagang			109	
8	Peternak			39	
9	Nelayan			-	
10	Montir			-	
11	Dokter swasta			-	
12	Bidan swasta			-	
13	Perawat swasta			-	
14	Pembantu rumah tangga			-	
15	TNI			-	
16	POLRI			-	
17	Pensiunan PNS/TNI/POLRI			-	
18	Pengusaha kecil menengah			-	
19	Pengacara			-	
20	Notaris			-	
21	Dukun kampung terlatih			-	
22	Jasa pengobatan alternatif			-	
23	Dosen swasta			-	
24	Pengusaha besar			-	
25	Arsitektur			-	
26	Seniman/ artis			-	
27	Karyawan perusahaan swasta			-	
28	Karyawan perusahaan pemerintahan			-	
29	Makelar/broker/mediator			-	
30	Sopir			21	
31	Tukang becak			13	
32	Tukang Ojek			-	
33	Tukang cukur			2	
34	Tukang batu/kayu			168	
Jumlah					

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Tahun		Tahun		Tahun 2019	
		L	P	L	P		
1	Tidak tamat SD					2622	Orang
2	Tamat SD					3258	Orang
3	Tamat SLTP					1127	Orang
4	Tamat SLTA					293	Orang
5	Tamat Akademi/PT					35	Orang

Jumlah Lembaga Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2019	Keterangan
1	TK/PAUD			5	
2	SD/Sederajat			8	
3	SLTP/Sederajat			6	
4	SLTA/SMK/Sederajat			2	
5	PTN			-	
6	PTS			-	
7	SLB			-	
	Jumlah pendidikan			21	

Jumlah Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2019
1	Rumah Sakit Umum Daerah			-
2	Rumah Sakit Umum Swasta			-
3	Puskesmas Umum			-
4	Puskesmas Perawatan			-
5	Puskesmas Pembantu			-
6	Poliklinik/Balai Pengobatan			-
7	Apotik			-
8	Posyandu			11
9	Toko Obat			-
10	Balai Pengobatan Masyarakat Swasta			-
11	Gudang Menyimpan Obat			-
12	Rumah/Kantor Praktek Dokter			-
13	Rumah Bersalin			-
14	Balai Kesehatan Ibu dan Anak			-
15	Rumah Sakit Mata (Khusus)			-
16	Poskesdes			-
17	Puskesmasling			-
18	Poskestren			-
19	Polindes			1

Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Tahun 2019

No	Uraian	Satuan (Ha)	Satuan (Ton/Ha)
1	Padi sawah	800	5 Ton
2	Padi ladang	-	-
3	Jagung	73	8 TON
4	Kacang kedelai	-	-
5	Kacang tanah	2	1 TON
6	Kacang panjang	3	2 TON
7	Ubi kayu		
8	Ubi Jalar		
9	Cabe	34	2 TON
10	Tomat		
11	Sawi	76	2 TON
12	Kentang		

13	Kubis		
14	Wortel		

Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan Tahun 2019

No	Uraian	Satuan (Ha)	Satuan (Ton/Ha)
1	Jeruk	2	12 TON
2	Alpokat		
3	Mangga		
4	Rambutan	2	4 TON
5	Manggis		
6	Pepaya	34	30 TON
7	Belimbing		
8	Durian		
9	Pisang	10	12 TON
10	Semangka	23	4 TON
11	Melon		
12	Anggur		
13			

Luas Dan Hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas Tahun 2019

No	Uraian	Swasta/negara		Rakyat	
		Luas (Ha)	Hasil (Kw/Ha)	Luas (Ha)	Hasil (Kw/Ha)
1	Kelapa				
2	Kopi			278	10
3	Cengkeh				
4	Coklat				
5	Tembakau			111	12
6	Tebu				
7	Teh				
8					
9					

Jenis dan Produksi Kehutanan Tahun 2019

No	Uraian	Produksi (Per Tahun)	Satuan (m3, liter, Ton)
1	Kayu Sengon	30	M3
2	Madu		
3	Bambu	45	M3
4	Jati		
5	Cemara		
6	Mahoni		

Jumlah Populasi Ternak

No	Uraian	Jumlah Pemilik		Jumlah Populasi	
		Tahun Lalu	Tahun Ini	Tahun Lalu	Tahun Ini
1	Sapi	150	150	150	163
2	Kerbau				
3	Ayam kampung				
4	Ayam broiler	7	6	2000	1200
5	Bebek				
6	Kambing	120	139	240	556

**Jenis Dan Alat/Sarana Produksi Budidaya dan Alat Tangkap Ikan Laut,
Payau Dan Ikan Air Tawar Tahun**

No	Uraian	Produksi (Per Tahun)	Satuan (Ha, Unit, Ha/ m2)
1	Karamba Laut		
2	Tambak		
3	Jermal		
4	Pancing		
5	Pukat		
6	Jala		
7	Karamba Tawar		
8	Empang/kolam		
9	Danau		
10	Rawa		
11	Sungai		
12	Sawah		
13	Jala		
14	Pancingan		

Produksi Bahan Galian Tahun

No	Uraian	Pengelola/Pemilik	Kapasitas Produksi
1	Batu Kali		
2	Batu Gunung		
3	Batu Kapur		
4	Pasir		
5	Pasir batu		
6	Minyak bumi		
7	Gas alam		
8	Garam		

Sumber Air Bersih Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi (Baik/ Rusak)
1	Mata air	5	560	Baik
2	Sumur gali	1312	2573	Baik
3	Sumur pompa			
4	Hidran umum			
5	PAM			
6	Pipa			
7	Sungai	8	586	Rusak
8	Embung/ Telaga/ Danau			
9	Bak penampung air hujan			
10	Beli dari tangki swasta			
11	Depot isi ulang			
12	Sumber lain			

Potensi Wisata

No	Uraian	Luas	Pemanfaatan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Jumlah Unit	Kondisi (m)		Jumlah Panjang Jalan (m)
			Baik	Rusak	
1	Drainase	3	v	V	
	Jalan Desa				
	Jalan Antar Desa	3		V	7.5 km
	Permukiman				
2	Irigasi				
	Saluran Primer	3	v	V	
	Saluran Skunder				
	Saluran Tersier	4	v	V	
	Pintu Sadap				
	Pintu Air				

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No	Uraian	Th 13	Th 14	Th 15
1	Rumah Tidak Sehat			
2	Rumah Tidak Layak Huni	130	100	82

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Jumlah Unit/Ruas	Kondisi (m)		Jumlah Panjang Jalan (m)
			Baik	Rusak	
1	Jalan Desa				
	Aspal	6	2 v	4 v	13 km
	Makadam	1000		V	1 km
	Tanah	2500		V	2,5 km
	Sirtu				
	Conblok/Paving/Beton	2	v		0.2
2	Jalan Antar Desa				
	Aspal	4	v		
	Makadam	9			
	Tanah				
	Sirtu				
	Conblok/Paving/Beton				

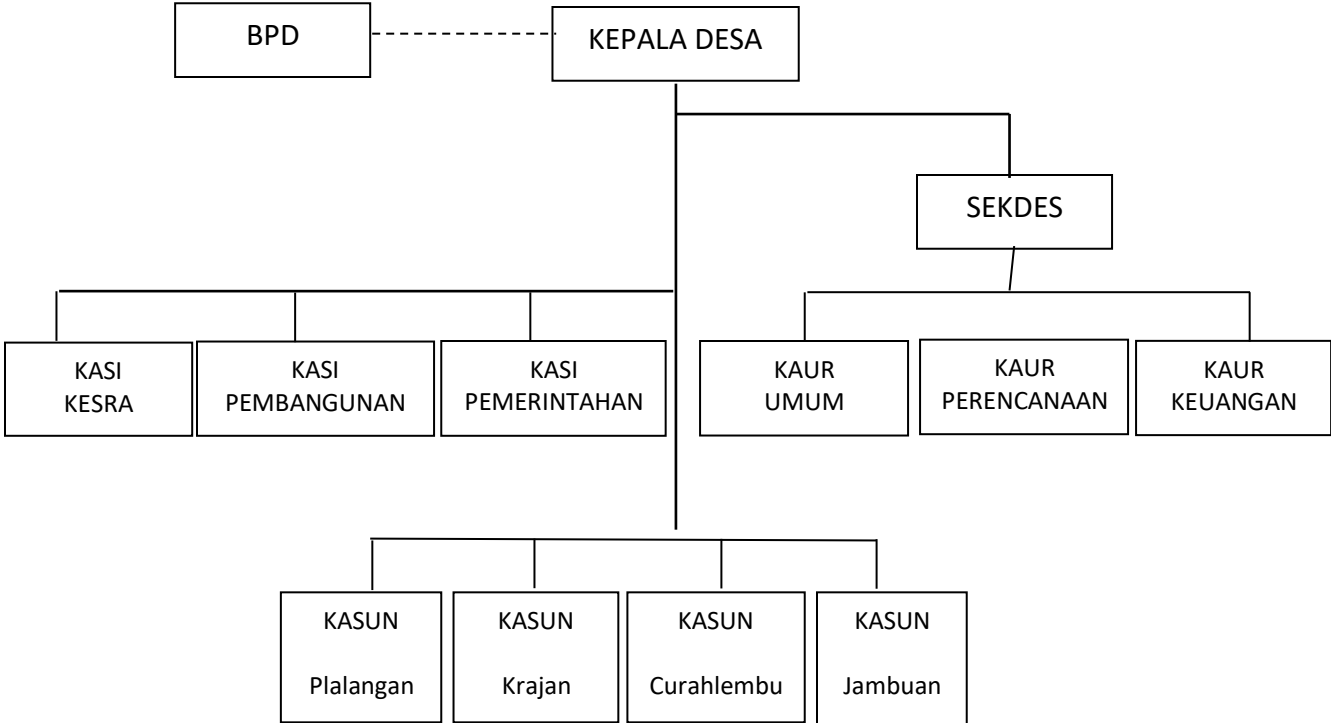
3. KELEMBAGAAN DESA

Data Lembaga Pemerintahan Desa Tahun 2019

No	Uraian	Keterangan	Pendidikan / Keterangan
1	Jumlah aparat pemerintahan Desa	13 org	
2	Jumlah perangkat desa	8 Unit Kerja	
3	Kepala Desa	Ada	
4	Sekretaris Desa	Ada	

5	Kepala Seksi Pemerintahan	Ada	
6	Kepala Seksi Pembangunan	Ada	
7	Kepala Seksi Pamong tani	Ada	
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Ada	
9	Kepala Urusan Umum	Ada	
10	Kepala Urusan Keuangan	Ada	
11	Kepala Urusan Perencanaan	tidak	
12	Kepala Urusan Trantib	Ada	
13	Jumlah Staf	7 org	
14	Jumlah Dusun di Desa	4 Dusun	
15	Jumlah Kepala Dusun yang aktif	4 Dusun	
16	Jumlah RW	22 RW	
17	Jumlah RT	52 RT	
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		
1	Keberadaan BPD	Ada	
2	Jumlah Anggota BPD	11 org	
	LEMBAGA EKONOMI DESA		
1	Jumlah BUMDes	1 Unit	
2	Jumlah Kelompok Tani	6 Kelp	
3	Jumlah Kelompok Ternak		
4	Jumlah Kelompok Simpan Pinjam	2 Kelp	

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



4. Masalah dan Potensi Desa

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim dan sebagai data tambahan dilakukan upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting. Di bawah ini adalah daftar masalah dan potensi desa yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat.

a. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Pemerintah desa kurang transparan terhadap masyarakat	Aparatur pemerintahan desa lengkap sdm Memadai
2	Pemerintah desa kurang disiplin dalam menjalankan tugas	Pemerintahan desa sudah mulai aktif
3	Musyawarah desa kurang melibatkan kelompok masyarakat	Sdm masyarakat sdh meningkat
4	Pelayanan Pemdes terhadap masyarakat kurang maksimal	Adanya kantor desa,SDM yg Memadai
5	Pelayan semua pengurus Rt di Desa kurang maksimal kepada masyarakat	Rt/Rw lengkap
6	Tata ruang di Pemerintahan Desa Kurang Optimal	Pemerintahan Desa,Apartaur pemerintah desa Aktif
7	Kinerja dalam menjalankan tugasnya, BPD kurang aktif dan aspiratif	Bpd Lengkap
9	Kurang Gapura di Jalan Masuk Desa dan Dusun.	Batas Batas sudah Jelas
10	Adminstrasi Pemerintah Desa belum rapi	Penataan Arsip mulai dilakukan
11	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW	Rt RW Lengkap
12	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketentraman & keamanan warga	Linmas lengkap

b. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Jalan gang di dusun Krajan masih susah dilewati dan berlumpur waktu musim hujan	Akses jalan ada
2	Jalan Alternatif dusun di Rt 01 menuju Rt 02 susah dilewati sepanjang 800 m	Akses jalan ada
3	Jalan di Rt 04/01 susah dilalui sepanjang 750 m	Akses jalan ada peLebaran jalan, ,pekerja
4	Jalan lingkungan di dusun Krajan rt01/07 susah dilalui pada musim hujan	Pekerja,tenaga Profesional
5	Pengembangan wisata kurang maksimal	Pemuda sadar wisata,tempat wisata
6	Jalan Akses wisata gunung Dringuh abang di dusun Krajan RT 02/08 masih belum maksimal dan sulit dilalui pada musim	Tempat wisata,akses jalan,pekerja

	hujan sepanjang 700 m	
7	Pengelolaan wisata Gunung mandireh Masih Belum maksimal	Pengurus dan pengelola sudah ada
8	Alat –alat wisata makam bujuk Soepi belum ada	Pengurus dan pengelola sudah ada
9	Jalan di dusun Curahlembu Rusak parah sepanjang 1200 m	Jalan Lebar,Pekerja
10	Dam pembegi air di Dusun Jambuan rusak parah dan hampir runtuh	Pekerja, Tenaga professional bahan Bangunan Lokal
11	Saluran Air bersih didusun Krajan Tidak berfungsi dengan baik	Mata air,pekerja,tenaga professional
12	Sarana Pendidikan di dusun Plalangan Kurang Memadai	Gedung Sekolah,Pekerja,Madrasah

c. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Tidak ada jadwal piket poskamling di Semua Dusun di Desa Plalangan	Patroli rutin masyarakat
2	Hansip kurang aktif dalam kinerja di Rw 1, Rw 3, Rw 5	Perte,muan anggota Hansip
3	Di Rt 06/2, Rt 07/2 dan Rt 03/1 belum ada hansip	Rekrutmen anggota Hansip
4	Banyak Musholla di desa Plalangan belum mempunyai mck dan tempat Wudu	Gotong royong
5	Sarana penunjang di Masjid Dusun Jambuan Belum Optimal	Gotong royong, mengumpulkan amal jariyah
6	MCK dan tempat wudhu di Masjid Darul Muttaqin dusun Jambuan kurang Optimal	Masjid,saluran Air
7	Kegiatan Olah Raga masyarakat di Rw 5 tidak berjalan di desa Kalisat tidak maksimal	
8	Belum adanya BUMDesa yang menangani masalah pompanisasi, pupuk, hasil panen	Adanya Kelompok Tani
9	Belum adanya Lumbung Desa	
10		

d. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Masalah	Potensi
1	Banyak MasyarakaT RTSM yg belum terdata dengan baik	Perbaikan data
2	Banyak Masyarakat miskin yang terlantar	Membuat lapangan kerja
3	Pemberdayaan perempuan Kurang Maksimal	Kelompok perempuan Aktif,sdm memadai
4	Kelompok Tani di desa Kalisat kurang maksimal	Kelompok Tani,Pelatih professional
5	Kelompok Pemuda di Dusa Kalisat Kurak maksimal	Pemuda karang Taruna
6	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	Perangkat Desa Aktif

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJMDES

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

1. Proses Pengkajian Keadaan Desa

a. Musyawarah Dusun/Kelompok

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjarangan masalah dan potensi yang ada di desa dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjarangan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW / Dusun yang telah dilakukan pada :

No	Musyawarah	Waktu Pelaksanaan		Tempat
1	Dusun Plalangan	Tgl.01 2019	September	Rumah Ahmad Syafiudin (KPMd)
2	Dusun Krajan	Tgl.02 2019	September	Rumah Bpk.Rahmad (Kasun)
3	Dusun Cura \hlembu	Tgl.02 2019	September	Mushalla Bpk guru Ali
4	Dusun Jambuan	Tgl.03 2019	September	Rumah Bpk.Kusnadi (,mudin)

Dari hasil penjarangan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Dusun, Kemudian dituangkan dalam format daftar usulan dusun.

b. MUSYAWARAH DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam musyawarah ditingkat Desa yang dilaksanakan pada 14 Septemner 2019 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun
2. Menyusun Sejarah Desa
3. Menyusun Visi dan Misi Desa
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan supra Desa.

2. Musyawarah Desa RPJM-Desa

Musyawarah Desa RPJM-Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa.

Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Musyawarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 14 bulan September tahun 2014

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbang penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 September 2019 bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM-Desa Tahun 2016-2021.

BAB IV

VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa :

“Terwujudnya Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat “

2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat.
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa selama periode 6 Tahun

Misi pertama : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.**

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;

Misi kedua : **Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.**

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
- c. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;

Misi ketiga : **Pembangunan Infrastruktur Dasar.**

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.
- b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

BAB V

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rumusan prioritas pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 4 bidang mendasar, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Meningkatkan kualitas pendataan Desa agar diperoleh data yang valid
- b. Penambahan dan penyusunan tata ruang Desa khususnya di bagian pelayanan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa
- d. Meningkatkan pengelolaan informasi Desa dengan menggunakan internet dan website
- e. Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan Desa dengan kegiatan tilik dusun seraca periodik
- f. Mengembangkan jaringan dengan penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- g. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain ; jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, lingkungan permukiman masyarakat Desa.
- b. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain ; air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa (posyandu), sarana dan prasarana kesehatan Desa.
- c. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain ; taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain : pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung Desa, pengelolaan usaha hutan Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kandang ternak, instalasi biogas.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup antara lain : penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan mengikutsertakan dalam setiap event pelatihan
- b. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan melengkapi kebutuhan setiap pos kampling
- c. Penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- d. Meningkatkan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Meningkatkan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan kerjasama dengan pihak ketiga

- b. Meningkatkan pelatihan teknologi tepat guna dan ikutserta dalam setiap event kegiatan
- c. Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa.
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan mempersiapkan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelompok :
 - ✓ kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif;
 - ✓ kelompok pengrajin, kelompok pemuda.
 - ✓ kelompok perempuan
 - ✓ kelompok miskin

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM KEGIATAN

1. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Prediksi Pendapatan Desa

Uraian Pendapatan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PADesa	11.000.000	11.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	17.000.000
Dana Desa	700.000.000	750.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000
Bagi hasil pajak dan Restr	15.000.000	25.000.000	50.000.0000	75.000.000	100.000.000	150.000.000
Alokasi Dana Desa	300.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000
Ban Keu dari Kab.						
Ban Keu dari Provinsi						
Hibah						
Sumbanga Pihak III						
Pendapatan Lain-lain	10.000.000	20.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000
JUMLAH	1.025.000.000	1.295.000.000	1.740.000.000	2.175.000.000	2.610.000.000	3.075.000.000

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

- Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
- Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APBDesa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APBDesa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif
Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakana olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa

Uraian Pengeluaran	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	
Belanja Penyenggaraan Pemerintahan	256.500.000	385.500.000	517.500.000	646.500.000	777.000.000	
Belanja Pelaksanaan Pembangunan	655.500.000	642.500.000	862.500.000	1.077.500.000	1.295.000.000	1.
Belanja Pembinaan Masyarakat	168.400.000	102.800.000	138.000.000	1.724.000.000	207.200.000	
Belanja Pemberdayaan Masyarakat	102.600.000	154.200.000	207.000.000	258.600.000	310.800.000	
Belanja tak terduga	10.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	

Lain lain						
JUMLAH	1.025.000.000	1.295.000.000	1.740.000.000	2.175.000.000	2.610.000.000	3.0

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

2. Program dan Kegiatan Indikatif

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi
1	Penyelenggaraan Pemerintahan		
1.1	Meningkatkan kualitas pendataan Desa agar diperoleh data yang valid		
1.1.1	Pendataan penduduk di tiap RT	52 RT	4 Dusun
1.1.2	Pencatatan penduduk lahir mati.datang pergi	52 RT	4 Dusun
1.2	Penambahan dan penyusunan tata ruang Desa khususnya di bagian pelayanan masyarakat		
1.2.1	Membuat ruang khusus pelayanan	1 Ruang	Kantor Desa
1.2.2	Pengadaan ATK lengkap	1 Unit	Ruang pelayanan
1.2.3			
1.3	Meningkatkan kualitas dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa		
1.3.1	Bintek tata klola rapat	2 Orang	Balai desa
1.3.2			
1.4	Meningkatkan pengelolaan informasi Desa dengan menggunakan internet dan website		
1.4.1	Mendatangkan Tutor ahli IT	1 Orang	Balai desa
1.4.2	Bintek IT	2 Orang	Balai desa

1.5	Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan Desa dengan kegiatan tilik dusun seraca periodik		
1.5.1	Peningkatan kapasitas Kasun	4 Orang	4 Dusun
1.5.2			
1.6	Mengembangkan jaringan dengan penyelenggaraan kerjasama antar Desa		
1.6.1	Pembangunan Jembatan	1 Unit	Desa Plalangan dan desa Ajung
1.6.2			
1.7	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa		
1.7.1	Pengadaan computer	3 unit	Ruang kaur
1.7.2	Pengadaan almari arsip	2 unit	Ruang kaur
1.7.3	Pengadaan meja kursi kerja	10 unit	Ruang Sekdes,kaur,kasun
1.7.4	Pengadaan Desel Jenset	1 Unit	Kantor desa

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi
2	Pelaksanaan Pembangunan		
2.1	Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa		
2.1.1	Pengaspalan jalan	3 x 400 M	Dusun Plalangan Rt.1 Rw.01
2.1.2	Pengaspalan jalan	3 x 300 M	Dusun Plalangan Rt.2 Rw.02
2.1.3	Pengaspalan jalan	3 x 240 M	Dusun Plalangan Rt.2 Rw.03
2.1.4	Pengaspalan jalan	3 x 350 M	Dusun Krajan Rt. 2 Rw. 06
2.1.5	Pengaspalan jalan	2.5 x 500 M	Dusun Krajan Rt. 1 Rw. 08
2.1.6	Pemavingan jalan	2 x 600 M	Dusun Krajan Rt. 2 Rw. 11
2.1.7	Pemavingan jalan	3 x 200 M	Dusun Jambuan Rt. 1 Rw. 22
2.1.8	TPT	1 x 600 M	Dusun Curah Lembu Rt.1 Rw. 016
2.1.9	TPT	1 x 600 M	Dusun Curah Lembu Rt. 1 Rw. 15

2.1.10	Pengaspalan jalan	2 x 500 M	Dusun Krajan Rt. 1 Rw. 07
2.1.11	Pengaspalan jalan	2 x 300 M	Dusun Jambuan Rt. 2 Rw. 20
2.1.12	Paving	2 x 400 M	Dusun Jambuan Rt. 2 Rw. 22
2.1.13	Paving	2 x 600 M	Dusun Curah Lembu Rt. 2 Rw. 16
2.1.14	Pembuatan Jembatan Dawuhan kembar	4 x 50 M	Dusun Plalangan Rt. 2 Rw. 04
2.1.15	Paving	2 x 300 M	Dusun Curah Lembu Rt. 1 Rw. 15
2.1.16	Pengaspalan jalan	2 x 200 M	Dusun Plalangan Rt. 3 Rw .5
2.1.17	Pengaspalan jalan	3 x 500 M	Dusun curah lembu Rt. 2. Rt. 12
2.1.18	Pemavingan jalan	3 x 150 M	Dusun Krajan Rt.2. Rw.7
2.1.19	Pengaspalan jalan	2 x 300 M	Dusun Krajan Rt .3.Rw.12
2.1.20	Pengaspalan jalan	2 x 250 M	Dusun Plalangan Rt. 2. Rw. 3.
2.1.21	Pengaspalan jalan	2 x 400 M	Dusun Krajan Rt.03 Rw.08
2.1.22	Pembuatan Dam	1 Unit	Dusun Jambuan Rt.02 Rw.020
2.1.23	Pembangunan plengsengan Dam Ampel	1 x 600 M	Dusun Curahlembu
2.1.24	Pembangunan plengsengan Dam Dringu	1 x 700 M	Dusun Krajan
2.1.25	Pembanguan TPT	4 x 150 M	Dusun Krajan
2.1.26	Pembanguan TPT	4 x 80 M	Dusun Jambuan
2.1.27	Pengaspalan jalan	2 x 300 M	Dusun Krajan Rt.03 Rw.08
2.1.28	Paving jalan lingkungan	2 x 400 M	Dusun Jambuan Rt.03 Rw.018
2.1.29	Paving jalan lingkungan	2 x 300 M	Dusun Krajan Rt.02 Rw.07
2.1.30	Rabat betong jalan lingkungan	2 x 400 M	Dusun Jambuan Rt.01/02 Rw.021
2.1.31	Pengaspalan jalan	3 x 400 M	Dusun Krajan Rt. 3. Rw.8
2.1.31	Pembuatan Gapura	1 Unit	Dusun Krajan Rt.02 Rw.09
2.1.32	Pembuatan Gapura	1 Unit	Dusun Curahlembu Rt.02 Rw.013
2.1.33	Pembuatan Gapura	1 Unit	Dusun Curahlembu Rt.02 Rw.012
2.1.34	Pembangunan plengsengan Dam resek	1 x 600 M	Dusun Curahlembu
2.1.35	Pembangunan Dam Pembagi	1 Unit	Dusun Curahlembu Rt.03 Rw.014
2.1.36	Pembangunan TPT	2 x 400 M	Dusun Plalangan Rt.02 Rw.03
2.1.37	Pembangunan TPT	4 x 500 M	Dusun Plalangan Rt.01 Rw.04
2.1.38	Paving jalan lingkungan	2 x 400 M	Dusun Plalangan Rt.01 Rw.04
2.1.39	Pembangunan TPT	1 x 200 M	Dusun Jambuan Rt.02 Rw.022
2.1.40	Pengaspala jalan SD Plalangan 03	3 x 600 M	Dusun jambuan Rt.01 Rw.018
2.1.41	Peningkatan Jalan (hotmic)	3 x 500 M	Dusun Krajan Rt 01/07 s/d 02/08
2.1.42	Pembangunan Dam pembagi	1 Unit	Dusun Jambuan Rt.03 Rw.022
2.1.43	Pembangunan Dam Pembagi	1 Unit	Dusun plalangan Rt.0

[illegible]

	prasarana pendidikan dan kebudayaan		
2.3.2	Pos Paud	1 Unit	Dusun Curah Lembu Rt. 1 Rw. 14
2.3.3	Pos Paud	1 Unit	Dusun Jambuan Rt. 1 Rw. 18
2.3.4	Pos Paud	1 Unit	Dusun Plalangan Rt. 2 Rw. 2
2.3.5	Rehab Pos Paud	1 Unit	Dusun Krajan Rt. 1 Rw. 06
2.3.6	Pembangunan gedung SD Unggulan	2 lokal	Dusun Curahlembu
2.4	Pembangunan gedung MI Bustanul Ulum	2 lokal	Dusun Jambuan
2.4.1	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.		
2.4.2	Pengaspalan jalan	2 x 700 M	Dusun Jambuan Rt.003 Rw.022
2.4.3	Pengaspalan jalan lanjutan	2 x 400 M	Dusun Jambuan Rt.002 Rw.020
2.4.4	Pengaspalan jalan lanjutan	2 x 300 M	Dusun Plalangan Rt.002 Rw.005
2.4.5	Pengadaan traktor	6 Unit	6 kelompok tani
2.4.6	Pengadaan Mesin Rontok Padi (DORS)	6 Unit	6 kelompok tani
2.5	Pembangunan plengsengan irigasi	5.000 M	4 Dusun
2.5.1	Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup.		
2.5.2	Pengadaan bibit mahoni	1.000 pohon	4 Dusun
2.5.3	Pengadaan bibit sengon laut	4.000 pohon	4 Dusun
2.5.4	Pembangunan sumurbor untuk penghijauan	1 Unit	Dusun Jambuan
2.5.5			

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi
3	Pembinaan Kemasyarakatan		
3.1	Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan mengikutsertakan dalam setiap event pelatihan		
3.1.1	Pelatihan keterampilan perbengkelan	120 Orang	4 Dusun
3.1.2	Pelatihan usaha produktif	90 Orang	4 Dusun
3.1.3	Pelatihan peternakan ayam dan itik	90 Orang	4 Dusun
3.1.4	Bintek peningkatan kapasitas BPD	11 Orang	Kantor desa
3.1.5	Bintek peningkatan kapasitas LPMD	20 Orang	Kantor desa
3.1.6	Bintek peningkatan kapasitas PKK	40 Orang	Kantor desa
3.1.7			
3.2	Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan melengkapi kebutuhan setiap pos kampling		
3.2.1	Pembangunan poskamling	8 pos	4 Dusun
3.2.2	Pemeliharaan/Rehab	26 pos	4 Dusun

3.2.3	Pengadaan senter	52 buah	26 pos/4 Dusun
3.2.4			
3.2.5			
3.2.6			
3.3	Penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga		
3.3.1	Membuat lapangan bulutangkis	8 lapangan	4 Dusun
3.3.2	Pengadaan Mija pimpong	1 Unit	Kantor desa
3.3.3			
3.3.4			
3.3.5			
3.3.6			
3.4	Meningkatkan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.		
3.4.1	Pengadaan alat handrah	1 Unit	Dusun Jambuan
3.4.2	Pengadaan alat Jaran goyang	1 Unit	Dusun Jambuan
3.4.3	Pengadaan alat musik patrol	1 Unit	SD Unggulan dusun Curahlembu
3.4.4			
3.4.5			
3.4.6			

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi
4	Pemberdayaan Masyarakat		
4.1	Meningkatkan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan kerjasama dengan pihak ketiga		
4.1.1	Memberdayakan kelompok tani	6 kelompok tani	4 Dusun
4.1.2	Study kelayakan usaha	6 kelompok tani	Kantor desa
4.1.3	Memberdayakan BUMDES	2 unit usaha	Kantor desa
4.1.4	Pengadaan bibit ikan coi	5000 ekor	Dusun Curahlembu
4.1.5	Pengadaan bibit lele	5000 ekor	Dusun Plalangan
4.1.6			
4.1.7			
4.2	Meningkatkan pelatihan teknologi tepat guna dan ikutserta dalam setiap event kegiatan		
4.2.1	Pelatihan pembuatan Tempe	20 Orang	Kantor desa
4.2.2	Pelatihan pembuatan kue	40 Orang	Kantor desa
4.2.3			
4.2.4			
4.2.5			
4.2.6			
4.2.7			
4.3	Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa.		
4.3.1	Bintek Sadarkum	24 Orang	Kantor desa

4.3.2	Studi banding	24 Orang	Desa Mandiri Malang
4.3.3			
4.3.4			
4.3.5			
4.3.6			
4.3.7			
4.4	Meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan mempersiapkan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelompok : kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok pengrajin, kelompok pemuda.		
4.4.1	Pelatihan peningkatan kapasitas	90 Orang	Kantor desa
4.4.2	Pelatihan kewirausahaan pemuda tani	120 Orang	Kantor desa
4.4.3			
4.4.4			
4.4.5			
4.4.6			
4.4.7			

3. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja yang ingin dicapai meliputi hal-hal sebagai berikut :

Matrik Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan Pemerintahan							
1	Penyusunan RKPDes Tepat Waktu	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Pengesahan APBDes Tepat Waktu	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
3	Kepemilikan Kartu Keluarga	%	85	87	90	93	96	99
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	5	5	4	4	3	3
5	Angka Putus Sekolah Dasar	%	30	25	20	15	10	5
6	Angka Putus Sekolah Menengah	%	40	35	30	25	20	15
7	Angka Putus Sekolah Atas	%	50	45	40	35	30	25
8	Penduduk Miskin	%	10	9	8	7	6	5
9	Index Kepuasan Masyarakat	A/B/C/D	B	B	A	A	A	A
2	Pelaksanaan Pembangunan							
1	Cakupan Pelayanan Posyandu	%	90	93	96	99	99	99
2	Angka Kematian Ibu dan Anak	%	0	0	0	0	0	0
3	Ruas Jalan Desa Kondisi Baik	%	50	60	70	80	90	100
4	Drainase Jalan Desa Kondisi Baik	%	50	60	70	80	90	100
5	Rasio Jaringan Irigasi	%	50	60	70	80	90	100
6	Rumah Tidak Layak Huni	%	50	60	70	80	90	100
7	Rumah Memiliki Jamban Keluarga	%	50	60	70	80	90	100
8	Cakupan Pemenuhan Air Bersih	%	50	60	70	80	90	100
9	Tempat Pembuangan Sampah	%/RT	50	60	70	80	90	100
3	Pembinaan Kemasyarakatan							
1	Partisipasi Perempuan di Pemerintahan	%	15	20	25	30	35	40
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Kemasyarakatan	%	15	20	25	30	35	40

3	Jumlah Kasus Pencurian	Kasus	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah Kasus Miras dan Narkoba	Kasus	0	0	0	0	0	0
4	Pemberdayaan Masyarakat							
1	Cakupan Jumlah KPMD	%	25	30	35	40	45	50
2	Proses Pendirian Pembentukan BUMDes	%	50	100	100	100	100	100
3	Cakupan Pelatihan Aparat Pemerintah Desa	%	40	50	60	70	80	90
4	Cakupan Pelatihan Kelembagaan Masyarakat	%	40	50	60	70	80	90

BAB VII
PENUTUP

Demikian RPJMDes ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Tahun 2016 - 2021 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDesa Tahun 2016 - 2021 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

KEPALA DESA PLALANGAN

SOFYAN ZULKARNAIN MALIK